

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat melalui pergerakan harga sahamnya (Retno dan Priantinah, 2012). Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah keinginan bagi para pemegang saham dikarenakan dapat memberikan pengembalian atas modal dan keuntungan yang besar. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka kemakmuran para pemegang saham juga akan meningkat (Haruman, 2008; dalam Wardoyo dan Veronica, 2013). Untuk mencapai tujuan tersebut para pemegang saham menyerahkan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan dikarenakan adanya keterbatasan pemegang saham atau pemilik dalam mengelola perusahaan (Imanta dan Satwiko, 2011).

Manajemen diberikan kewenangan oleh pemegang saham untuk melakukan jasa atas nama pemegang saham atau pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Pemegang saham atau pemilik mengharapkan manajemen dapat bertindak profesional dalam mengelola perusahaan guna memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham (Nuswandari, 2009). Disisi lain, manajemen mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kemakmuran pribadi karena menganggap insetif yang diterima selama ini tidak sesuai dengan kemampuan yang dikeluarkan (Imanta dan Satwiko, 2011).

Tindakan yang dilakukan manajemen tersebut akan merugikan para pemegang saham dikarenakan dapat menimbulkan biaya yang akan menurunkan keuntungan, sehingga akan mempengaruhi harga saham dan menurunkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; dalam Retno dan Priantinah, 2012). Hal inilah yang menimbulkan konflik diantara pemegang saham dan manajemen. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya yang dapat menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, serta pengawasan untuk membatasi perilaku manajemen.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik keagenan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan merupakan upaya-upaya yang dapat memberikan keyakinan pada pemegang saham bahwa pemegang saham akan memperoleh pengembalian atas modal yang ditanamkan (Shleifer dan Vishy, 1997; dalam Winanto dan Widayat, 2013) Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem yang menggambarkan adanya hubungan antara berbagai partisipan dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan (FCGI, 2001; dalam Sixpria dan Suhartati, 2013).

Sistem tata kelola perusahaan dibagi menjadi mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, sekertaris perusahaan, dan manajer perusahaan. Mekanisme eksternal adalah pasar modal, bank sebagai pemberi dana, pemerintah sebagai *regulator*, masyarakat sebagai konsumen, supplier, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya (Cadbury, 2000; dalam Syahkroza, 2003). Oleh karena itu, dengan

berjalannya mekanisme internal dan mekanisme eksternal secara bersamaan, maka sistem tata kelola perusahaan mencoba memberikan motivasi bagi manajemen untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (Alexander dan Matts, 2003; dalam Wulandari, 2006). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyebutkan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, harus dipastikan pula bahwa telah menerapkan prinsip-prinsip pada setiap aspek kegiatan bisnis yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Isu mengenai tata kelola perusahaan telah lama berkembang, ketika Indonesia dilanda krisis keuangan yang berkepanjangan pada tahun 1998 (Saputra, 2010).

Menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajemen dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki pihak manajemen. Manajemen akan ikut merasakan sebagai pemilik, sehingga memotivasi dirinya untuk meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan keinginan pemegang saham termasuk keinginan manajemen itu sendiri (Winanto dan Widayat, 2013). Dengan demikian, manajemen pun akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan risiko yang ada karena berdampak langsung bagi dirinya (Cruthley dan Hansen, 1989; dalam Wiranata dan Nugrahati, 2013). Meningkatnya kepemilikan manajerial diharapkan dapat menyatukan kepentingan para pemegang saham dan manajemen, sehingga konflik keagenan berkurang dan akan meningkatkan nilai perusahaan.

Sebagian besar perusahaan di Indonesia dikendalikan oleh keluarga (Simanjuntak, 2010). Keberadaan keluarga dalam perusahaan memberikan keuntungan bagi perusahaan sebab pihak keluarga lebih mengetahui informasi tentang perusahaan dan dapat langsung mengawasi perilaku manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan (Anderson dan Reeb, 2003). Disisi lain, tidak menutup kemungkinan keluarga lebih memilih menyelamatkan uang yang ditanamkan dalam perusahaan ketika perusahaan mengalami masalah, yang kemudian dapat menurunkan nilai perusahaan (Viallonga dan Amit, 2004). Komisaris independen dalam perusahaan pun mempunyai peranan untuk mengawasi manajemen. Keberadaan komisaris independen dapat memberikan nasehat bagi manajemen agar laporan laba yang dihasilkan berkualitas (Boediono, 2005; dalam Winanto dan Widayat, 2013). Kehadirannya juga dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah dan mengkomunikasikan keinginan para pemegang saham pada manajemen (Fama dan Jensen, 1983; dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Penelitian antara mekanisme tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan memberikan hasil yang positif dan negatif. Winanto dan Widayat (2013) menggunakan proksi kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, dan komposisi dewan komisaris independen. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa kepemilikan manajerial ada pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan temuan Amyulianthy (2012) memberikan bukti adanya pengaruh positif, serta temuan Adnatara (2013) memberikan bukti kepemilikan manajerial tidak

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada kepemilikan keluarga dalam temuan Winanto dan Widayat (2013) memberikan bukti pengaruh negatif, berbeda dengan temuan Pindado, Requejo, dan Torre (2008) yang memberikan bukti positif terhadap nilai perusahaan. Proksi komposisi dewan komisaris independen adanya pengaruh positif senada dengan temuan Amyulianthy (2012), sedangkan temuan Wulandari (2006) memberikan bukti komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan bahwa manajemen telah bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham, serta melindungi kepentingan pemegang saham sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Hal ini juga mendorong manajemen untuk patuh dalam membayarkan pajak. Adanya pembayaran pajak tersebut dapat secara langsung mengurangi laba bersih perusahaan (Suandy, 2014:1). Laba bersih digunakan pemegang saham untuk mengukur besar kecilnya pengembalian atas modal dan keuntungan yang diperoleh, sehingga dapat disimpulkan laba bersih dapat mencerminkan nilai perusahaan itu sendiri. Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan upaya untuk mengurangi biaya pajaknya melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, namun jumlah biaya pajaknya dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diinginkan (Lumbantoruan, 1996; dalam Suandy, 2014:6)

Langkah awal dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya untuk merencanakan biaya

pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada untuk mencapai laba yang diharapkan. Pada prakteknya, perencanaan pajak sama dengan penghindaran pajak karena keduanya bertujuan untuk memaksimalkan laba bersih dengan memanfaatkan peraturan yang ada (Suandy, 2014:7). Menurut Desai dan Dharmapala (2006) menyebutkan secara tradisional perencanaan pajak sebagai upaya untuk upaya mentransfer kekayaan negara kepada pemegang saham. Prespektif teori keagenan berpendapat perencanaan pajak dapat membuka peluang bagi manajemen yang oportunistik untuk memanipulasi laba dan penyampaian informasi yang kurang tepat pada pemegang saham yang menimbulkan asimetri informasi. Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009; dalam Winanto dan Widayat 2013) menyebutkan bahwa manajemen yang agresif sehubungan dengan perencanaan pajak yang mungkin juga agresif dalam keputusan pelaporan keuangan mereka. Pemegang saham menganggap tindakan manajemen sebagai ancaman yang dapat merugikan mereka, sehingga penilaian mereka terhadap perusahaan menjadi rendah. Hanlon dan Slemord (2009) menyatakan *tax aggressiveness* dianggap sebagai upaya perencanaan pajak maka pengaruhnya positif terhadap perusahaan. Sebaliknya akan memberikan pengaruh negatif apabila hal tersebut dianggap sebagai ketidakpatuhan.

Penelitian perencanaan pajak dan nilai perusahaan memberikan bukti positif maupun negatif. Penelitian Chasbiandani dan Martani (2012) memberikan bukti penghindaran pajak jangka panjang memberikan pengaruh positif, sedangkan penghindaran pajak

jangka pendek tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian Winanto dan Widayat (2013) memberikan bukti bahwa perencanaan pajak menggunakan *cash ETR* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Winanto dan Widayat (2013) menyebutkan banyak perusahaan di Indonesia, aktivitas perencanaan pajak yang dilakukan manajemen semata-mata hanya untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya. Temuan penelitian Wahab dan Holland (2012; dalam Winanto dan Widayat, 2013) memberikan pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengamati pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian sekarang juga akan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas. Proksi yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, komposisi dewan komisaris independen, dan *cash ETR*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah mekanisme tata kelola perusahaan (kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, dan komposisi dewan komisaris independen) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah perencanaan pajak (menggunakan *cash ETR*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk memberikan bukti empirik mekanisme tata kelola perusahaan (kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, dan komposisi dewan komisaris independen) berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk memberikan bukti empirik perencanaan pajak (menggunakan *cash ETR*) berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemegang saham maupun calon investor mengenai keadaan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan penjelasan bab-bab pada penelitian sekarang yang terdiri dari 5 bab dalam bentuk sistematika yaitu sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab satu berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bab dua berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik, landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, pengembangan hipotesis, dan kerangka berpikir.

Bab 3: Metode Penelitian

Bab tiga berisi desain penelitian, indentifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan sampel, serta teknik analisis data.

Bab 4 : Analisis dan Pembahasan

Bab empat berisi karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan yang berhubungan dengan temuan penelitian berupa argumentasi logis hasil penelitian, perbandingan dengan konsep, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan penelitian.

Bab 5 : Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Bab lima berisi simpulan yang menjawab pertanyaan penelitian pada perumusan masalah atau hipotesis penelitian, keterbatasan yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dalam

penelitian sekarang karena faktor-faktor yang tidak dapat diatasi oleh peneliti, serta saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.